

# **Peran *International Labour Organization* (ILO) Melalui Proyek PRIDE Dalam Mengupayakan Kesetaraan Hak Kaum LGBT Di Thailand Tahun 2012-2015**

**Made Rai Puspa Wilantari<sup>1)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>**

<sup>(123)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: puspawilantari@gmail.com<sup>1)</sup>, ratihkumaladewi@unud.ac.id<sup>2)</sup>, kawitriresen@unud.ac.id<sup>3)</sup>

## **ABSTRACT**

*Thailand is one of the countries that has promoted its country as a gay paradise country. Unfortunately, this LGBT-friendly image is not what that image depicts. LGBT people in Thailand often experience acts of inequality and even discrimination by their surrounding peoples. The ILO is trying to take on its role as an international organization in helping LGBT people in Thailand to get the rights they deserve. Therefore, this study aims to explain the roles of ILO in efforting equal rights for LGBT people in Thailand through the PRIDE project conducted in 2012-2015. By using the concepts of the Role of International Organizations and Human Rights, the researcher found that ILO taking three roles with pre-determined standards, and used it as a basis for evaluating the Thai government through the collaboration that has been carried out with the actors involved.*

**Keywords:** *equal rights, ILO, LGBT, PRIDE, Thailand*

## **1. PENDAHULUAN**

Kesetaraan hak merupakan kesamaan hak yang seharusnya didapatkan tanpa memandang umur ataupun identitas seksual mereka, seperti kesetaraan dalam bertanggung jawab, mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil, baik dalam pekerjaan ataupun dalam menjalin hubungan di kehidupan mereka (Neliën Haspels, B. S, 2005). Di dunia ketenagakerjaan, kaum LGBT sering menerima tindakan ketidaksetaraan hak, dan ketika mereka mengalami diskriminasi permasalahannya lebih sulit untuk diselesaikan, karena identitas seksual mereka yang tidak termasuk ke dalam aturan struktur pemerintah, perusahaan ataupun organisasi (Suriyasarn, 2015).

*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* (LGBT) digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan identitas seksual seseorang yang tidak termasuk ke dalam hukum heteroseksual, pria ataupun wanita, melainkan mendefinisikan jenis kelamin mereka dengan definisi mereka sendiri (Suriyasarn, 2015). Orang LGBT dianggap sebagai orang dengan kelainan mental, sehingga mereka sering menerima tindakan ketidaksetaraan dan tidak jarang mereka justru menjadi korban kekerasan oleh orang lain.

Thailand merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk dengan jumlah LGBT yang cukup banyak Menurut *World*

*Values Survey (WVS) Country Result Thailand* pada tahun 2013, yang dikutip dari tulisan *Homonegativity in Southeast Asia: Attitudes Toward Lesbians and Gay Men in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam*, tiga dari enam negara yang ada di Asia Tenggara menjadi negara-negara yang masyarakatnya lebih banyak menolak keberadaan kaum LGBT di lingkungan sekitar mereka dibandingkan dengan tiga negara lainnya.

Selain itu, Thailand juga dianggap telah gagal dalam melindungi serta memberikan kesetaraan hak bagi kaum LGBT berdasarkan *Human Rights Council* dan perjanjian *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Thailand (Foundation, K. H, 2015). Menurut artikel *Shadow Report to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights regarding Thailand's Protection of the Rights of LGBTI Persons* (2015), kegagalan yang dialami oleh Thailand diantaranya:

1. Gagal dalam menerapkan undang-undang anti-diskriminasi yang dilandasi oleh orientasi seksual, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak bagi kaum LGBT.
2. Gagal melindungi kaum LGBT dari tindakan diskriminasi yang sudah menyebar luas dikalangan masyarakat Thailand, yang mana hal ini mempengaruhi kesempatan mereka untuk mendapatkan hak mereka, khususnya dalam mendapatkan pekerjaan.

3. Gagal memberikan pengakuan hukum kepada pasangan sesama jenis, sehingga menghalangi mereka memperoleh kehidupan yang bebas bersama keluarga mereka.
4. Gagal mengambil tindakan untuk mengurangi diskriminasi yang terjadi terhadap kaum LGBT dan mengatasi permasalahan unik kaum LGBT yang menyangkut kesehatan mental.
5. Gagal dalam melindungi para pelajar dengan identitas LGBT, sehingga mempengaruhi hak mereka untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
6. Gagal dalam menghilangkan segala bentuk kebijakan yang menimbulkan tindakan diskriminasi, seperti misalnya dalam penggunaan seragam yang sesuai dengan identitas seksual bagi pelajar.
7. Gagal memberikan izin resmi untuk merubah jenis kelamin agar sesuai dengan gender yang diperankan bagi kaum LGBT, sehingga sangat memberikan hambatan dalam menjalani kehidupan mereka di dalam negara mereka.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut cukup membuktikan bahwa Thailand belum bisa melindungi kaum LGBT dari perlakuan yang tidak adil dan belum bisa memberikan kesetaraan hak di dalam negara mereka (Foundation, K. H, 2015), sehingga hal inilah yang menjadi dasar dari dilakukannya tindakan oleh ILO di Thailand.

Dalam kasus kaum LGBT yang terjadi di Thailand, ILO menganggap bahwa kasus

LGBT di Thailand merupakan kasus yang sangat serius, karena pemerintah Thailand, perusahaan dan organisasi-organisasi pekerja lainnya belum bisa menjamin kesetaraan hak di tempat kerja dan belum bisa menempatkan kaum LGBT sebagai prioritas mereka. Dari permasalahan tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian perihal bagaimana peran ILO dalam mengupayakan kesetaraan hak kaum LGBT di Thailand.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan tiga literatur. Literatur pertama yaitu tulisan Junpa Marpaung (2018) berjudul *Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Pekerja Anak di Thailand Tahun 2010-2014*. Tulisan Marpaung (2018) berfokus kepada peran ILO dalam menangani kasus pekerja anak di Thailand melalui proyek IPEC, yang mana proyek tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama antara ILO dengan pemerintah Thailand. Marpaung (2018) menyebutkan bahwa dalam menangani kasus pekerja anak di Thailand, ILO berperan sebagai aktor mandiri yang mengambil fungsi sebagai organisasi internasional.

Organisasi internasional merupakan aktor penting dalam hubungan internasional, yang mampu menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya, dan mampu mempengaruhi negara dalam membuat kebijakan mereka. Organisasi internasional tidak hanya berperan dalam hubungan antar pemerintahan saja, melainkan juga hubungan antar aktor non pemerintah. Gambaran Marpaung terkait peran ILO

sebagai organisasi internasional adalah bagaimana ILO mengambil perannya dalam membantu Thailand melalui program-program yang dilakukan, dan program-program tersebut mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kehidupan para pekerja di Thailand, terutama bagi pekerja anak.

Meskipun memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini, peran ILO dalam tulisan Marpaung (2018) mampu membantu peneliti dalam melihat bagaimana ILO mengambil perannya dengan melakukan upaya-upaya dalam menangani suatu kasus, seperti halnya permasalahan pekerja anak. Marpaung (2018) juga membantu peneliti melihat bahwa ILO dalam melakukan perannya sebagai organisasi internasional dapat memberikan pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan serta proses berjalannya kehidupan di suatu negara.

Literatur kedua ditulis oleh Aira Tama (2017) yang berjudul *Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Melegalkan Pernikahan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Di Tiongkok*. Tulisan Tama (2017) membahas mengenai hak-hak kaum LGBT yang seharusnya mereka dapatkan, serta menjabarkan upaya apa saja yang dilakukan oleh UNDP dalam melakukan perannya untuk membantu kaum LGBT mendapatkan hak mereka, yang dalam tulisan Tama (2017) difokuskan pada hak untuk mendapatkan apa yang kaum LGBT inginkan, yaitu pernikahan sesama jenis yang masih tabu dikalangan masyarakat.

Dalam tulisan Tama (2017), munculnya isu-isu transnasional seperti isu gender ini merupakan akibat dari adanya perkembangan globalisasi dan industrialisasi. Isu gender yang dulu masih menjadi isu *low politics*, sekarang telah menjadi isu *high politics* yang mampu menjadi lingkup kajian baru dalam hubungan internasional. Organisasi-organisasi internasional juga telah memulai untuk mengambil peran terhadap isu gender yang difokuskan pada isu LGBT.

Tulisan Tama (2017) dapat membantu peneliti dalam melihat bahwa setiap orang memiliki kesetaraan hak untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial mereka, meskipun mereka dianggap memiliki kelainan dalam tubuh mereka seperti orang-orang LGBT. Selain itu, Tama (2017) juga telah memberikan gambaran kepada peneliti mengenai isu LGBT yang telah berubah menjadi isu yang lebih serius di dunia internasional sehingga mampu menggerakkan organisasi internasional dalam penyelesaiannya.

Literatur ketiga ditulis oleh Intan Kinanthi Damarin Tyas (2019) yang berjudul *Upaya Transnational Advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand*. Tulisan Tyas (2019) membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh jaringan advokasi untuk mendorong pelegalan *LGBT Rights* di Thailand, sehingga LGBT dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Tyas dalam tulisannya juga membahas mengenai dasar dari timbulnya isu diskriminasi dan kriminalisasi yang terjadi pada kaum LGBT di Thailand, yang mana diskriminasi dan

kriminalisasi yang terjadi ini timbul akibat dari adanya perubahan sistem pemerintahan yang turut merubah pola pikir masyarakat di negara tersebut.

Tulisan Tyas (2019) mencoba untuk memberikan gambaran terkait jaringan advokasi tersebut, yang berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat. Jaringan advokasi yang dibahas oleh Tyas tidak hanya melibatkan aktor-aktor lokal seperti *Anjaree Foundation*, *Rinbow Sky Association of Thailand* (RSAT), dan *Purple Sky Network* (PSN), tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi internasional seperti UNDP, USAID, ILO, dan ILGA.

Tulisan Tyas (2019) dapat memberikan gambaran kepada peneliti mengenai dasar dari timbulnya diskriminasi ataupun kriminalisasi terhadap kaum LGBT di Thailand. Tyas juga membantu peneliti dalam melihat keseriusan kasus LGBT di Thailand untuk dapat segera diselesaikan, karena telah mampu menggerakkan TANS, bahkan melibatkan organisasi internasional dalam penyelesaiannya.

Ketiga literatur yang digunakan dalam penelitian kali ini akan sangat berguna bagi peneliti, terutama dalam melihat tindakan organisasi internasional dalam meralisasikan perannya di dunia internasional yang dapat menjadi wadah kerjasama sekaligus aktor mandiri dalam melakukan segala tindakan yang diperlukan. Yang akan membedakan penelitian ini dengan literatur-literatur sebelumnya adalah jika literatur sebelumnya membahas mengenai peran organisasi internasional sesuai dengan

bidangnya, maka penelitian ini mencoba untuk memberi gambaran bahwa organisasi internasional bisa mengambil alih tanggung jawab negara meskipun memiliki fokus peran yang berbeda dari bidangnya, yang dalam penelitian kali ini dapat digambarkan melalui peran ILO dalam menangani permasalahan LGBT di Thailand.

Selain itu penelitian kali ini juga akan membahas spesifik tentang masalah kesenjangan penerapan hukum dengan realita yang dialami oleh kaum LGBT di Thailand, sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa LGBT di Thailand tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat di sekitar mereka dan hal inilah yang kemudian dapat menjadi keunikan tersendiri dari penelitian kali ini.

### 3. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan dua buah konsep yang akan membantu menjawab rumusan masalah, yaitu konsep Peran Organisasi Internasional dan konsep *Human Rights*.

#### a. Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional juga harus memiliki dasar dari struktur organisasi yang jelas agar mampu mengusahakan tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama, baik hubungannya antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Peran suatu organisasi internasional erat kaitannya dengan adanya upaya dari organisasi tersebut. Terdapat tiga peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Teuku May Rudy (2009), yaitu:

1. Sebagai wadah untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik, baik sesama anggotanya maupun pihak-pihak lain yang terlibat.
2. Sebagai sarana perundingan dalam menentukan keputusan bersama yang akan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang terlibat.
3. Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan, seperti kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan dalam pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping operation* dan lainnya.

#### b. *Human Rights*

*Human Rights* atau hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Tim Dunne (2009) mengaitkan *Human Rights* dengan istilah "*sovereignty as responsibility*", yang artinya kedaulatan merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara.

Dalam kasus perlindungan hak asasi manusia, jika negara dianggap tidak peduli, tidak mau atau tidak mampu memberikan kesetaraan hak bagi masyarakatnya, maka tanggung jawab tersebut akan diambil alih oleh aktor non-negara. Oleh karena itu, suatu negara dapat dikatakan sangat peduli terhadap hak asasi manusia jika negara tersebut mampu melonggarkan kedaulatannya dengan membiarkan aktor-aktor non-negara melakukan pengawasan ataupun campur tangan ke dalam negaranya atas dasar perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tim Dunne (2009) melihat bahwa campur tangan aktor non-negara merupakan suatu bentuk peringatan terhadap negara untuk bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan terkait pelanggaran hak asasi manusia jangka panjang. Menurut Tim Dunne (2009), peringatan ini sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk menjaga hak asasi manusia bagi warga negaranya, tetapi juga untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang serius dikemudian hari.

#### 4. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian secara kualitatif berupaya untuk menganalisis suatu fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data-data, penelitian lapangan, *content analysis*, dan penelitian komparatif (Neuman, 2007). Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan data-data, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang akan diteliti, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mampu memberikan gambaran terhadap fenomena yang terjadi.

Dasar dari penggunaan metode penelitian ini adalah karena penelitian ini ingin menganalisis lebih dalam suatu fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data-data terkait dan mendeskripsikannya dengan jelas,

sehingga akan mampu menghasilkan penelitian yang sesuai dengan fenomena yang sebenarnya, yang dalam hal ini terkait peran ILO sebagai organisasi internasional dalam mempromosikan kesetaraan hak kaum LGBT di Thailand.

#### 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu LGBT termasuk ke dalam isu gender yang telah menjadi isu *high politics* dan mampu memberikan pengaruh terhadap kehidupan internasional, terutama dalam perkembangan politik dan sosial-budaya (Tama, 2017).

Thailand merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk dengan jumlah LGBT yang cukup banyak, yaitu sekitar 300.000 *transwomen* dan 30.000 *transmen* dari 67.089.500 jumlah total penduduk di Thailand (Winter, 2009). Pada tahun 1960-an, Thailand dikenal dengan negara yang digunakan sebagai tempat peristirahatan dan hiburan bagi tentara Amerika pada masa perang Vietnam, dan sejak saat itu hiburan dan perdagangan seks sangat populer dikalangan tentara Amerika dan Thailand mempromosikan negaranya sebagai negara tujuan *sex tourism* melalui citra *gay paradise*

Banyak masyarakat, terutama kaum LGBT bergantung pada sektor pariwisata yang didalamnya termasuk sektor prostitusi, yang mana hal ini yang kemudian memunculkan banyak kontradiktif dikalangan masyarakat mengingat sektor prostitusi merupakan sektor rawan penyakit menular seperti HIV/AIDS.

## 5.1 Kesetaraan Hak dan Diskriminasi Kaum LGBT Di Thailand

Kesetaraan hak sangat berkaitan dengan penerapan hak asasi manusia di dalam suatu negara, karena menyangkut pemenuhan hak asasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang agama, ras, suku ataupun identitas seksual yang mereka perankan. perlindungan serta hak kaum LGBT tidak berbeda dengan yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, hanya saja jika dilihat dari konteks gender yang diperankan oleh mereka, maka hak-hak tersebut menjadi berbeda karena menyangkut nilai-nilai heteroseksual yang diterapkan oleh masing-masing negara.

Thailand dikenal dengan citra negara yang ramah terhadap kaum LGBT, dan menjadi salah satu negara yang telah memiliki aturan perlindungan yang dikhususkan untuk kaum LGBT. Thailand turut mengikuti *Human Rights Council* yang diadakan oleh PBB dalam rangka menghilangkan kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT (Foundation, K. H, 2015) dan pada tahun 2012 pemerintah Thailand juga telah menyetujui RUU terkait kesetaraan gender dengan dukungan dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand (Suriyasarn, 2015). Namun aturan serta hukum tersebut belum direalisasikan sepenuhnya oleh pemerintah Thailand.

Kaum LGBT dianggap memiliki status *Permanent Mental Disorder* atau mengalami gangguan mental secara

permanen, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan public, dan 22% dari total kaum LGBT percaya bahwa dengan menjadi LGBT telah mengurangi peluang dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, terutama dalam mendapatkan peluang pekerjaan (Winter, 2009).

Selain itu, stigma *Permanent Mental Disorder* tersebut juga membuat mereka harus melewati lebih banyak tes psikologi saat mencari pekerjaan dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya yang lebih banyak mendapatkan tes kemampuan diri karena mereka dianggap memiliki emosional yang tidak teratur dan tidak layak untuk bergabung di suatu perusahaan, bahkan beberapa dari mereka langsung ditolak tanpa melewati kualifikasi calon pekerja (Katoey Face Closed Doors, 2013).

Tidak jarang orang LGBT meninggalkan tempat kerja mereka karena prasangka dan ejekan yang sering dilontarkan kepada mereka, bahkan beberapa diantara mereka menerima tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual, seperti mendapatkan penghinaan, tamparan, tendangan dan pemerkosaan (Suriyasarn, 2014). Bagi kaum LGBT yang beruntung, mereka akan bisa diterima di dalam suatu organisasi ataupun kelompok pemberdayaan. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja terpaksa mengarah ke dunia hiburan, seperti perfilman, pertunjukan festival, *entertainment*, bahkan dunia hiburan malam dan prostitusi, sehingga hal ini

mampu membuat citra kaum LGBT menjadi lebih buruk dikalangan masyarakat dan tentu saja semakin menutup kesempatan bagi kaum LGBT untuk mendapatkan kesetaraan hak di lingkungan mereka. (UNDP & USAID, 2014).

## **5.2 International Labour Organization (ILO)**

*International Labour Organization (ILO)* merupakan badan yang berfokus pada segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, baik dalam mendorong terciptanya peluang kerja yang layak bagi masyarakat dunia maupun membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lainnya yang masih berhubungan dengan sektor ketenagakerjaan internasional (Saraswati, 2016). ILO bergerak atas dasar prinsip keadilan sosial dan tripartis, yaitu menjadi penghubung antara pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk saling bekerjasama.

Standar internasional yang dimiliki oleh ILO ini dikatakan sebagai standar yang mampu memberikan dampak dan pengaruh yang cukup besar bagi pembuatan kebijakan serta proses berjalannya kehidupan negara (Marpaung, 2018), sehingga standar-standar tersebut dapat dijadikan pedoman bagi otoritas nasional untuk menerapkan aturan dan kebijakan di dalam negara mereka.

Sejak tahun 1995, ILO mulai memfokuskan target pada permasalahan kontemporer yang sangat mempengaruhi sektor ketenagakerjaan, yaitu permasalahan hak asasi manusia, tidak

hanya terbatas pada hak pekerja, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Proyek *PRIDE at Work: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of Work* adalah proyek pertama ILO yang berfokus pada kesetaraan hak serta diskriminasi berdasarkan gender dan identitas seksual di tempat kerja.

Alasan dasar ILO melakukan proyek ini di Thailand adalah kesenjangan perlakuan terhadap kaum LGBT. Terlepas dari adanya citra Thailand yang sangat terbuka bagi kaum LGBT, ILO menemukan bahwa kaum LGBT ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Thailand, yang dapat dikatakan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Selain itu, ILO tidak menemukan hukum yang secara spesifik melarang tindakan diskriminasi terhadap kaum LGBT sehingga memunculkan kesenjangan antara pemberlakuan hukum terkait LGBT dengan praktek yang sebenarnya terjadi di dalam negara mereka, dan tentu saja hal-hal tersebut dapat menjadi penyebab kaum LGBT mengalami tindakan buruk jika berada di lingkungan masyarakat (Suriyasarn, 2015).

## **5.3 Peran ILO Dalam Mengupayakan Kesetaraan Hak Kaum LGBT Melalui Proyek PRIDE**

Terlibatnya ILO dalam permasalahan kaum LGBT di Thailand memang tidak secara tertulis disetujui oleh Thailand, namun dari beberapa data yang diperoleh oleh ILO bersumber dari kerjasama antara

ILO dengan Thailand, seperti peraturan serta perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan evaluasi oleh ILO. Dari data-data tersebut dapat dikatakan bahwa Thailand terbuka terhadap keterlibatan ILO dalam membantu Thailand melakukan tanggung jawabnya dan tidak ada ancaman ataupun intervensi oleh ILO kepada pemerintah Thailand yang akan mempengaruhi kedaulatan yang dimiliki oleh Thailand. Hal inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa pemerintah Thailand sebenarnya sangat peduli terhadap masyarakatnya, hanya saja penerapan hukum yang ada di negaranya belum terealisasi secara maksimal.

Peneliti menemukan bahwa tujuan dari ILO melakukan proyek ini tidak hanya untuk merealisasikan prinsip dasarnya sebagai organisasi internasional, tetapi juga untuk meningkatkan reputasi dari ILO itu sendiri. Inisiatif ILO untuk melakukan proyek PRIDE ini untuk menunjukkan bahwa ILO memang mampu untuk menjadi organisasi terdepan dibawah naungan PBB yang sangat peduli dengan permasalahan hak asasi manusia (Organization, I. L. 2017), meskipun ILO harus mengambil resiko atas isu sensitif yang kemungkinan sulit untuk diselesaikan, yang dalam hal ini isu sensitif tersebut terkait kesetaraan hak bagi LGBT.

Proyek PRIDE yang dilakukan oleh ILO dilaksanakan di 16 negara, dan Thailand menjadi salah satu target pertama ILO dalam melaksanakan proyek PRIDE pada tahun 2012, bersama dengan 3 negara lainnya, yaitu Argentina, Hungaria, dan Afrika Selatan (Suriyasarn, 2015).

Untuk mempermudah mendapatkan informasi dan merealisasikan tujuan-tujuan proyek PRIDE yang telah dibentuk, ILO melakukan kerjasama dengan *Norwegian Ministry of Foreign Affairs* dan *Swedish International Development Agency* (Sida). ILO juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Thailand seperti *National Human Rights Commission*, *The National Social Welfare Promotion Commission*, *The Ministry of Labor*, dan *The Ministry of Social Development and Human Security*.

Pada awal dilakukannya proyek PRIDE di Thailand, ILO berhasil melakukan kerjasama dan dialog sosial dengan beberapa organisasi pemberdayaan LGBT yang ada di Thailand, seperti *Anjaree Group*, *Thai Transgender Alliance* (TGA), *Foundation for SOGI Rights and Justice* (FOR-SOGI), *Bangkok Rainbow Organization* (BRO), dan *Rainbow Sky Association of Thailand* (RSAT).

Jika dikaitkan dengan menggunakan penggolongan peran organisasi internasional yang diungkapkan oleh Teuku May Rudy (2009) pada kerangka konseptual, upaya-upaya yang dilakukan oleh ILO tersebut dapat menggambarkan tiga peran organisasi internasional, yaitu sebagai wadah untuk menggalang kerjasama, sebagai sarana perundingan serta berkomunikasi antar aktor yang terlibat, dan sebagai lembaga mandiri yang dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan. Ketiga peran tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Sebagai Wadah Untuk Menggalang Kerjasama.

Peran ILO sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dalam proyek PRIDE di Thailand dapat dilihat melalui prinsip dasar ILO itu sendiri, yaitu tripartisme yang membantu pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk saling berhubungan. Pada proyek PRIDE di Thailand, ILO menerapkan prinsip tripartisme dalam melakukan kerjasama dan dialog sosial bersama aktor-aktor yang terlibat pada tahun 2012 hingga tahun 2013. ILO melakukan kerjasama dan dialog sosial ini berdasarkan tujuan dari dilakukannya proyek PRIDE itu sendiri, yaitu untuk mengidentifikasi hukum yang dikhususkan bagi kaum LGBT serta mengidentifikasi pola dan bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT dalam menjalani kehidupan mereka.

## 2. Sebagai Sarana Perundingan dan Sarana Berkomunikasi

Peran ILO sebagai sarana perundingan dan sarana berkomunikasi dilakukan oleh ILO dengan mengadakan forum nasional pada tahun 2014 sebagai akhir dari proyek PRIDE di Thailand. ILO menjadikan forum nasional ini sebagai tempat bertemunya aktor-aktor yang terlibat di dalam dialog sosial yang dilakukan sebelumnya, yang mana dalam forum ini ILO berusaha untuk menyediakan tempat untuk berdiskusi antar aktor terkait permasalahan kesetaraan hak kaum LGBT yang sering diabaikan oleh pemerintah dan masyarakat di Thailand.

## 3. Sebagai Lembaga Mandiri

ILO disebut memiliki standar yang berbeda dengan organisasi pada umumnya, karena ILO merumuskan, mengadopsi ataupun menerapkan standar

sesuai dengan konsensus yang telah dihasilkan berdasarkan prinsip tripartisme, ILO memegang peran sebagai lembaga mandiri di dunia internasional yang dapat melakukan segala tindakan yang sesuai dengan tujuan didirikannya ILO itu sendiri meskipun fokus bidang ILO bukan pada kesetaraan gender, dan upaya yang dilakukan oleh ILO dalam menjalankan perannya telah memberikan pengaruh terhadap penerapan hukum dan aturan terkait kaum LGBT yang ada di Thailand pada tahun 2015 melalui dibentuknya undang-undang *Gender Equality Act* terkait kesetaraan hak setiap orang tanpa melihat identitas seksual ataupun gender yang diperankan.

Dengan dilakukannya peran ini, ILO tidak hanya telah membantu Thailand dalam melakukan tanggungjawabnya memberikan kesetaraan hak bagi kaum LGBT di negaranya, tetapi ILO juga telah memberikan gambaran terkait keseriusan permasalahan kesetaraan hak kaum LGBT di dunia internasional.

## 5.4 Hambatan dan Indikasi Keberhasilan Proyek PRIDE Di Thailand

Hambatan internal yang dialami oleh ILO berupa ketidaksesuaian pelaksanaan tugas antara GED dengan konsultan internal ILO. Namun pada proyek PRIDE, tugas GED dengan tugas konsultan internal ILO mengalami kekeliruan. Kedua badan ini melakukan tugas yang tertukar, sehingga menyebabkan tidak fokusnya anggota ILO, terutama GED dalam melakukan proyek

PRIDE, dan hal ini kemudian memberikan pengaruh terhadap pembagian tugas di dalam internal ILO.

ILO juga mengalami hambatan eksternal dalam melaksanakan proyek PRIDE di Thailand, yaitu pada saat melakukan pendekatan terhadap pemerintah Thailand. Pendekatan yang dilakukan oleh ILO melalui kampanye sempat mendapatkan penolakan oleh pemerintah Thailand untuk beberapa waktu, sehingga menyebabkan lamanya proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.

Peran yang dilakukan oleh ILO di Thailand melalui proyek PRIDE pada periode tahun 2012 hingga tahun 2013 belum dapat terlihat sepenuhnya, karena pada periode tersebut ILO masih melakukan kerjasama dengan aktor-aktor yang terlibat untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data-data terkait permasalahan kaum LGBT di Thailand. Namun pada tahun 2014, peran ILO mulai terlihat melalui forum nasional yang diadakan oleh ILO. Forum ini mampu mempertemukan pemerintah, pengusaha, pekerja, organisasi LGBT, masyarakat sipil dan kaum LGBT dalam satu ruangan untuk saling berdiskusi, sehingga dari sinilah dapat dikatakan peran ILO sebagai organisasi internasional sudah terealisasikan.

Selain melalui forum tersebut, keberhasilan peran ILO melalui proyek PRIDE juga dapat dilihat dari dibentuknya undang-undang *Gender Equality Act* oleh ILO. Undang-undang ini telah disetujui langsung oleh Raja Thailand, Yang Mulia

Raja Bhumibol Adulyadej pada bulan Maret tahun 2015. *Gender Equality Act* ini berisikan tentang kesetaraan perlakuan terhadap semua orang tanpa melihat identitas seseorang, baik itu perempuan, laki-laki, ataupun identitas seksual lainnya yang tidak termasuk perempuan atau laki-laki (Adulyadej, 2015).

Meskipun keberhasilan peran ILO di Thailand tidak terlihat secara signifikan, Thailand mengalami kemajuan dalam penanganan kesetaraan hak kaum LGBT di negaranya. Hal ini dapat dilihat dari artikel "*Thailand Akan Akui Gender Ketiga*" yang dikeluarkan oleh *CNN Report* terkait rencana pengakuan gender ketiga oleh pemerintah Thailand pada tahun 2015. Selain itu, menurut artikel "*Marriage for Everyone*" yang dikeluarkan oleh *Bangkok Post* tahun 2020, Thailand juga telah merencanakan pelegalan pernikahan sesama jenis bagi masyarakatnya yang memegang status sebagai kaum LGBT. Meskipun kedua hal tersebut masih berupa rencana pemerintah Thailand, setidaknya Thailand telah mengalami kemajuan dalam memperlakukan kaum LGBT yang ada di negaranya, dan kedua hal ini dapat menjadi bukti bahwa ILO memang telah melakukan tugasnya dalam berperan membantu Thailand memberikan kesetaraan hak bagi kaum LGBT di dalam negaranya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan ILO melakukan perannya di Thailand tidak hanya sekedar membantu kaum LGBT mendapatkan hak-

hak mereka dan membantu Thailand dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara ramah terhadap kaum LGBT, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ILO memang mampu untuk menjadi organisasi terdepan dibawah naungan PBB yang sangat peduli dengan permasalahan hak asasi manusia.

Dalam proyek PRIDE di Thailand pada tahun 2012 hingga tahun 2015, ILO melakukan tiga peran sebagai upaya dalam mempromosikan kesetaraan hak bagi kaum LGBT di Thailand, yaitu berperan sebagai wadah bekerjasama antar aktor yang terlibat, sebagai sarana perundingan serta berkomunikasi, dan sebagai lembaga yang mandiri dalam melakukan segala tindakan. Ketiga peran ILO ini dilakukan dengan berlandaskan prinsip dasar ILO, yaitu keadilan sosial dan tripartisme, yang mana melalui prinsip dasar tersebut, ILO dapat melakukan segala tindakan yang dianggap penting dalam mempromosikan kesetaraan hak bagi kaum LGBT di Thailand.

ILO memang sempat mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan perannya mempromosikan kesetaraan hak bagi kaum LGBT di Thailand, namun ILO dapat dikatakan telah merealisasikan tiga peran yang seharusnya dilakukan oleh organisasi internasional dengan bantuan aktor-aktor yang juga terlibat di dalamnya. Meskipun ILO mengambil peran diluar dari fokus bidangnya dan keterlibatan ILO tidak memiliki bukti persetujuan oleh pemerintah Thailand, tetapi peran ILO dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan berkat keterbukaan pemerintah Thailand itu sendiri yang masih

peduli terhadap hak asasi setiap masyarakatnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Drs. T. May Rudy, SH., MIR. M. SC (2009). *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Mas'oeed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Neuman, W. L. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education, Inc.

Longlois, A. J. (2015). *Human Rights, LGBT Rights and International Theory*. London and New York: Routledge.

Prof. Dr. Djam'an Satori, M. A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA Bandung.

Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA Bandung.

### Dokumen

Adulyadej, K. B. (2015, March 08). *Gender Equality Act*. Thailand Gender Equality Act. diakses dari: <https://www.hrw.org/news/2015/09/21/thailand-gender-equality-act>

Chandra Roy, M. K. (2002). *The International Labour Organization: A Handbook for Minorities and Indigenous Peoples*. diakses dari: <https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-59-The-International-Labour-Organization-A-Handbook-for-Minorities-and-Indigenous-Peoples.pdf>

- Institute, E. (2014, December). *Business Commitment To LGBT Human Rights*. diakses dari: [https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/12/ManualLGBT\\_emIng%C3%AAs\\_Vers%C3%A3o-Final.pdf](https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/12/ManualLGBT_emIng%C3%AAs_Vers%C3%A3o-Final.pdf)
- (ILO), I. L. (n.d.). *Gender Identity and Sexual Orientation: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of Work. Results of the ILO's PRIDE Project*. Gender, Equality and Diversity Branch (GED).diakses dari: <https://www.ilo.org>
- Nelien Haspels, B. S. (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. diakses dari: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_150508.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_150508.pdf)
- nswp, (n.d.). *Global Network of Sex Work Projects: Promoting Health and Human Rights*. diakses dari: [https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SUSO%20Asia%20Pacific%20Report\\_Oct2014.pdf](https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SUSO%20Asia%20Pacific%20Report_Oct2014.pdf)
- Organization, I. L. (n.d.). *The ILO in Thailand*. diakses dari: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_672738.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_672738.pdf)
- Organization, I. L. (2017, Agustus). ILO EVALUATION. *iTrack Evaluation*.diakses dari: <https://www.ilo.org>
- Somavia, J. (n.d.). *International Labour Organization*. diakses dari: [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/former-directors-general/WCMS\\_192716/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/former-directors-general/WCMS_192716/lang-en/index.htm)
- Sida. (2010). *Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons*. sida.se. diakses dari: [https://www.sida.se/contentassets/21013d2a0a3048ed8d3deb5de0a13d0/human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-persons-conducting-a-dialogue\\_3327.pdf](https://www.sida.se/contentassets/21013d2a0a3048ed8d3deb5de0a13d0/human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-persons-conducting-a-dialogue_3327.pdf)
- Simpkins, D. (1997-1998). *Rethinking the Sex Industry: Thailand's Sex Workers, The State, and Changing Cultures of Consumption*. diakses dari: <https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?cc=mfsfront;c=mfsfront;idno=ark5583.0012.005;g=mfsg;rgn=main;view=text;xc=1>
- Suriyasarn, B. (2014). *Gender Identity and Sexual Orientation in Thailand*. Thailand: International Labour Organization. diakses dari : [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms\\_356950.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_356950.pdf)
- Suriyasarn, B. (2015). *PRIDE at Work: A Study on Discrimination at Work on The Basis of Sexual Orientation and Gender Identity in Thailand*. Thailand: International Labour Organization. diakses dari : [https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS\\_368644/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_368644/lang-en/index.htm)
- Survey, W. V. (2013). *World Values Survey Thailand Country Results 2013*. Retrieved from World Values Survey. diakses dari: <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp>
- Timothy Dunne, M. H. (2009). *Human Rights In International Relation*. Researchgate.diakes dari: [https://www.researchgate.net/publication/43525803\\_Human\\_R](https://www.researchgate.net/publication/43525803_Human_R)

- ights\_in\_International\_Relations
- UNDP, U. &. (2014). *Being LGBT in Asia: Thailand Country Report*. Bangkok: UNDP. diakses dari : [https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS\\_368644/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_368644/lang-en/index.htm)
- United Nation Human Rights, O. o. (2012). *Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law*. diakses dari: <https://www.ohchr.org/documents/publications/bornfreeandequalallowres.pdf>
- United Nations Human Rights. (n.d.). *Human Rights*. diakses dari: <https://www.ohchr.org/documents/publications/handbookparliamentarians.pdf>
- Winter, Sam. (2009), *Cultural Considerations for the World Professional Association for Transgender Health's Standards of Care: The Asian Perspective*. ResearchGate. diakses dari: [https://www.researchgate.net/publication/240238667\\_Cultural\\_Considerations\\_for\\_the\\_World\\_Professional\\_Association\\_for\\_Transgender\\_Health's\\_Standards\\_of\\_Care\\_The\\_Asian\\_Perspective](https://www.researchgate.net/publication/240238667_Cultural_Considerations_for_the_World_Professional_Association_for_Transgender_Health's_Standards_of_Care_The_Asian_Perspective)
- Jurnal dan Karya Ilmiah**
- Cai Wilkinson, P. G. (2017). LGBT Rights in Southeast Asia: One Step Forward, Two Steps Back? *IAFOR Journal of Asian Studies*. diakses dari: <http://iafor.org/archives/journals/iafor-journal-of-asian-studies/10.22492.ijas.3.1.01.pdf>
- Eric Julian Manalastas, T. T. (2017). Homonegativity in Southeast Asia: Attitudes Toward Lesbians and Gay Men in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. *Asia-Pacific Social Science Review*. diakses dari: <http://apssr.com/wp-content/uploads/2018/03/2manalastas-053017-1.pdf>
- Foundation, K. H. (2015). Shadow Report to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights regarding Thailand's Protection of the Rights of LGBTI Persons. *Kaleidoscope Human Rights Foundation*. diakses dari: [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/THA/INT\\_CESCR\\_CSS\\_THA\\_20028\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/THA/INT_CESCR_CSS_THA_20028_E.pdf)
- Marpaung, J. (2018). Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Pekerja Anak di Thailand Tahun 2010-2014. *JOM FISIP*, 5, 4-5. diakses dari : <https://www.neliti.com/publications/190024/peran-international-labour-organization-ilo-dalam-melindungi-pekerja-anak-di-tha>
- Mastropasqua, K. (2015, June 8). *Global Discrimination Against LGBT Persons: 2015 United Nations Report*. Retrieved from Journalist's Resource: <https://journalistsresource.org/studies/international/human-rights/global-discrimination-against-lgbt-persons-2015-united-nations-report/>
- Saraswati, I. (2016). *Peran Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) Terkait Dengan Upaya Perlindungan Dan Kesetaraan Hak Perempuan Dalam Bekerja*. Universitas Hasanuddin. diakses dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/77626874.pdf>
- Tama, A. (2017). *Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Melegalkan Pernikahan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Lgbt) Di Thailand*. *JOM FISIP*. diakses dari:

<https://media.neliti.com/media/publications/201302-none.pdf>

Tyas, I. K. (2019). *Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand*. Jurnal Hubungan Internasional. diakses dari : [https://www.researchgate.net/publication/335962561\\_Upaya\\_Transnational\\_Advocacy\\_Networks\\_dalam\\_Mendorong\\_Legalisasi\\_LGBT\\_Rights\\_di\\_Thailand](https://www.researchgate.net/publication/335962561_Upaya_Transnational_Advocacy_Networks_dalam_Mendorong_Legalisasi_LGBT_Rights_di_Thailand)

#### Website

(2018). *RUU di Parlemen, Thailand Siap Legalkan Pernikahan Sesama Jenis*. Indonesia: Tempo.co. diakses dari : <https://dunia.tempo.co/read/1323435/pekan-ini-thailand-aktifkan-status-darurat-nasional-virus-corona>

Ammon, R. (2010, Mar 2). *Gay Thailand News & Reports 2007*. Thailand: Global Gayz.com. diakses dari: <https://www.globalgayz.com/>

Yongcharoenchai, C. (2013). *The Two Faces of Thai Tolerance*. Thailand: Bangkok Post. diakses dari: <https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/368584/the-two-faces-of-thai-tolerance>

Howard, M. R. (2014, May 30). *ILO to Release Report on Workplace Discrimination Againsts LGBT in Thailand*. Retrieved from International Labour Organization: [https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS\\_245128/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_245128/lang--en/index.htm)

International, Out Right Action. (2019, Maret 29). *15 Targeted Killings of Lesbians in Thailand Since 2006: IGLHRC Report*. diakses dari:

<https://outrightinternational.org/content/15-targeted-killings-lesbians-thailand-2006-iglhrc-report>

(2013). *Katoey Face Closed Doors*. Bangkok: Bangkok Post. diakses dari: <https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/355011/katoey-face-closed-doors>

Lovell, N. (2015, December 30). *Theorising LGBT Rights as Human Rights: A Queer(itical) Analysis*. Retrieved from E-International Relations. diakses dari: <https://www.e-ir.info/2015/12/30/theorising-lgbt-rights-as-human-rights-a-queeritical-analysis/>

LILJAS, P. (2014, Maret 5). *TIME. Thailand's Intolerance of Its Own LGBT Community Will Surprise You*. diakses dari: <https://time.com/12603/thailand-s-intolerance-of-its-own-lgbt-community-will-surprise-you/>

*Ratifications For Thailand*. (n.d.). Retrieved from International Labour Organization: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210\\_COUNTRY\\_ID:102843](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102843)

Wiriyapong, N. (2020). *Marriage for everyone*. Bangkok: Bangkok Post. diakses dari: <https://www.bangkokpost.com/business/1950364/marriage-for-everyone>

Yongcharoenchai, C. (2013, Februari 3). Bangkok Post. *Ladyboys Lost In Legal System*. diakses dari:

<https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/334017/ladyboys-lost-in-legal-system>